

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi Narbuko, dan Abu Cholid. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arie. S. Hutagalung. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta : LPHI.
- Bushar Muhammad. 2013. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Djoni Sumardi Gozali. 2017. *Hukum Pengadaan Tanah : Asas Kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta : UII Press.
- H. Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Hermanto Suaib. 2017. *Suku Moi : Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Malang : AnImage.
- Hesty Astuti. 2000. *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM.
- Indah Prabawati, dkk. 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Unesa University Press.
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____. 2023. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis. 2011. *Pencabutan Hak, Pembebasan dan Pengadaan Tanah*. Bandung : Mandar Maju.
- M.Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Olan Sitorus dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Soepomo. 1984. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Pratama.
- _____. 1997. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Rikardo Simarmata. 2006. *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Bangkok : UNDP.
- Rosdalina. 2017. *HUKUM ADAT*. Ctk. 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Soejono Soekanto dan Soleman B Taneko. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali.
- Soejono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- _____. 1979. *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*. Jakarta : Acadimica.
- Soleman B. Taneko. 1987. *Hukum Adat : Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung : PT Eresco Bandung.
- Stepanus Malak dan Wa Ode Likewati. 2011. *Etnografi Suku Moi*. Bogor : PT Sarana Komunikasi Utama.

- Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta : Kencana.
- Tolib Setiady. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung : Alfabeta.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe : Unimal Press.

Jurnal

- Al Fath dan Razky Fawwaz. 2024. "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Pulau Rempang ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia." *Forschungsforum Law Journal*. Volume 1. Nomor 01. Januari 2024.
- Andi Erwin Hamzah, dkk. 2023. "Pengadaan Tanah terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Teluk Wondama." Volume 7. Nomor 2. Februari 2023.
- Ardy Kurniawan. 2021. "Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Di Papua." *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*. Volume 1. Nomor 2. September 2021.
- Arief Fahmi Lubis. 2021. "Kedudukan Hukum dari Hak Ulayat dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Pertahanan Negara di Provinsi Papua Barat." *Jurnal Esensi Hukum*. Volume 3. Nomor 2. Desember 2021.
- Aris Adiando. 2020. "Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terhadap Perolehan Hak atas Tanah Adat." *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3. Nomor 1.
- Asdar Djabbar. 2020. "Peranan Pemilik Tanah dalam Pelepasan Tanah Adat untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik." *JIHK*. Volume 1. Nomor 2. Januari 2020.
- Aziz Siregar. 2024. "Characteristics of Customary Law and Its Characteristics." *Journal of Adat Recht*. Volume. 1. Nomor 1. Mei 2024.
- Deo Enggartiasto, dkk. 2021. "Problematisasi dan Solusi pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta Internasional Airport." *Tunas Agraria*. Volume 4. Nomor 1. Januari 2021.
- Desi Suanti. 2019. "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Adat dalam Melestarikan Kebudayaan Adat Dayak Lundayeh di Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara." *Ejournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 7. Nomor 4. Oktober 2019.
- Dian Cahyaningrum. 2022. "Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi." *Negara Hukum : Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. Volume 13. Nomor 1. Juni 2022.
- Ervan Hari Sudana, dkk. 2022. "Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Notary Law Journal*. Volume 1. Nomor 1. Februari 2022.
- Herlin Manik. 2019. "Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat." *Jurnal Selat*. Volume 6. Nomor 2. Agustus 2019.

- Hodidjah, dan Aria Dimas Harapan. 2020. "Proses Pembebasan Lahan pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan)." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3. Nomor 2. Desember 2020.
- Imam Koeswahyono. 2008. "Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan bagi Umum." *Jurnal Konstitusi*. Volume 1. Agustus 2008.
- Indraprasta Bagus Bramantyo dan Indri Fogar Susilowati. 2023. "Analisis Yuridis Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat." *Novum : Jurnal Hukum*. Volume 11. Nomor 1. Juli 2023.
- Irfan Nur Rahman, dkk. 2011. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*. Volume 8. Nomor 11. Mei 2011.
- Kornelius Benuf, dan Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*. Volume 7. Nomor 1. Edisi Juni 2020.
- M. Roem Syibly dan Muhammad Farhan Ahsani. 2022. "Pengadaan Tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 Menurut Perspektif Fikih Agraria". *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*. Volume 4. Nomor 1. Agustus 2022.
- M. Sofyan Pulungan. 2023. "Menalaah Masa Lalu, Menata Masa Depan : Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosial." *Undang : Jurnal Hukum*. Volume 6. Nomor 1. Mei 2023.
- Made Oka Cahyadi Wiguna. 2021. "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi*. Volume 18. Nomor 1. Maret 2021.
- Miranda Nissa dan Atik Winanti. 2021. "Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Volume 8. Nomor 1.
- Muh. Ardilla Amry, dkk. 2024. "Analisis Perlindungan Hukum dalam Konteks Pembebasan Lahan Hijau." *Ikraith Humaniora*. Vol 8. No 1. Maret 2024
- Muhammad Taufiq Hidayat, dan Eko Rial Nugroho. 2024. "Kedudukan Hak Milik Perorangan atas Tanah Adat Suku Moi Di Papua Barat (Studi Kasus pada Kota Sorong Provinsi Papua Barat)" Prosiding. *Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Volume 2. Nomor 2. Maret 2024.
- Mulyadi Tanzili. 2018. "Asas dan Prinsip Pengadaan Tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum." *Varia Hukum*. Volume 28. Nomor 34.
- Nes Tabumi. 2024. "Perspektif Pemerintah Provinsi Papua pada Penerimaan Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua." *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Volume 4. Nomor 1. Januari 2024.

- Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi, dkk. 2023. "Analisis Yuridis Hak Ulayat terhadap Kepemilikan Tanah Adat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. Volume 3. Nomor 3. Juli 2023.
- Nicholas Ardy Wibisana, dkk. 2024. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat." *SAPIENTIA ET VIRTUS*. Volume 9. Nomor 1. Maret 2023.
- Rachmi Syarfina. 2019. "Pengaruh Hukum Adat dalam Proses Peralihan Hak Tanah Ulayat pada Pembangunan Perluasan Bandara Di Jayapura." *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*. Volume 1. Nomor 1. Juli 2019.
- Rahayu Subekti. 2016. "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Yustisia*. Volume 4. Nomor 2. Mei 2016.
- Sangap Andrian Simanjuntak. 2022. "Tinjauan Yuridis Sertifikat Hak Milik atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Jurnal Kajian Konstitusi*. Volume 2. Nomor 1. Juni 2022.
- Septya Hanung Surya Dewi, dkk. 2020. "Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat." *Legislatif*. Volume 4. Nomor 1. Oktober 2020.
- Sulastriyono. 2014. "Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Yudisial*. Volume 3. Nomor 3.
- Yanto Sufriadi. 2011. "Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Bengkulu)." *Jurnal Hukum*. Volume 18. Nomor 1. Juni 2011.

Tesis, Disertasi

- Bantu Purba. 2011. "Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai." Yogyakarta : *Disertasi* di Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta.
- Rahmayani Rapia Sydu Palembang. 2024. "Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah Adat Buton Ditinjau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Studi Kasus di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)." *Tesis* di Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Taqwaddin. 2010. "Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (MUKIM) di Provinsi Aceh." *Disertasi* di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

Wawancara

- Wawancara dengan Demianus Aru Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Sorong. Kantor Bupati Sorong. 17 Februari 2025. Jam 9.00 WIT.

Wawancara dengan Lodwig Christovel Andrew Malaseme. Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Sorong sekaligus Masyarakat Adat Marga Malaseme. Kantor Walikota Sorong. 17 Februari 2025. Jam 13.00 WIT.

Wawancara dengan Melkianus Su. Tokoh Intelektual Moi. 21 Februari 2025. Do. Pyocoffe. Jam 15.00 WIT.

Wawancara dengan Simson Suu. Kepala Biro Penyelesaian Konflik Adat. Kediaman Simson Suu. 15 Februari 2025. Jam 13.00 WIT.

Wawancara dengan Simson Suu. Kepala Biro Penyelesaian Konflik Adat. Kediaman Simson Suu. 18 Februari 2025. Jam 10.15 WIT.

Website, Artikel, dan lain-lain.

Administrator. 2023. "Wapres Canangkan Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya," 17 Juli 2023. <https://papuabaradayaprov.go.id/berita/10/wapres-canangkan-pembangunan-kantor-gubernur-papua-barat-daya.html>.

Damang Averroes Al-Khawarizmi. Prinsip-prinsip Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. <https://negarahukum.com/prinsip-prinsip-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum.html>

Nelce Kambuaya. *Ground Breaking Rusun ASN di Papua Barat Daya*. Pemprov Papua Barat Daya. 5 September 2024. <https://papuabaradayaprov.go.id/>

Petrus Lamak. 2024. "Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya Tambah Lahan 35 Hektare." *TribunSorong*. Mei 2024.